

**DISKURSUS IDENTITAS *KEBALIAN*:  
RESPON TERHADAP MODERNITAS DAN DAMPAK  
PARIWISATA**

**I Gusti Agung Paramita**

**Universitas Hindu Indonesia, Denpasar**

[paramita@unhi.ac.id](mailto:paramita@unhi.ac.id)  
[apsariparamita@yahoo.com](mailto:apsariparamita@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Studi ini berupaya melakukan pelacakan terhadap asal usul diskursus identitas *kebalian* dalam masyarakat Bali dan kondisi sosial-kultural yang melandasinya kemunculannya. Wacana ini muncul di kalangan kelas menengah terdidik Bali sebagai bentuk kegelisahan terhadap perubahan sosial-kultural dan ekologis yang terjadi sejak Orde Baru akibat perkembangan industri turisme. Akumulasi dampak perkembangan pariwisata Bali menyebabkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan produktif, ledakan gelombang migrasi penduduk luar Bali, persaingan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang, sekularisasi kehidupan sehari-hari sebagai konsekuensi kehidupan modern, perubahan budaya di kalangan generasi muda, lemahnya otoritas lembaga-lembaga adat dan agama, semakin terpinggirkannya orang lokal di tengah desakan kapitalisme pariwisata, dan sempitnya ruang-ruang ekspresi budaya dan keagamaan. Dampak perkembangan industri pariwisata di Bali ini telah mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan Bali kontemporer. Berbagai persoalan inilah menimbulkan sebuah kecemasan sehingga melahirkan diskursus yang bernada politik identitas yakni *kebalian*.

Kata kunci: identitas, kebalian, modernitas dan pariwisata

## ABSTRACT

This study attempts to trace the origins of the discourse of cultural identity in Balinese society and the socio-cultural conditions that underlie its emergence. This discourse emerged among Bali's educated middle class as a form of anxiety about the socio-cultural and ecological changes that have occurred since the New Order due to the development of the tourism industry. The accumulated impact of Bali's tourism development has resulted in increasingly high levels of productive land conversion, an explosive wave of migration of people outside Bali, economic competition between local residents and immigrants, secularization of daily life as a consequence of modern life, cultural changes among the younger generation, weak authority of institutions. traditional and religious institutions, the increasingly marginalized local communities amid the pressures of tourism capitalism, and limited spaces for cultural and religious expression. The impact of the development of the tourism industry in Bali has influenced the social and environmental conditions of contemporary Bali. These various issues are what give rise to anxiety, giving birth to discourse that smacks of identity politics, *kebalian*.

Key words: identity, kebalian, modernity and tourism

### I. PENDAHULUAN

Identitas tidak memiliki arti yang tunggal. Istilah identitas bisa mewakili berbagai macam identifikasi atas individu maupun kelompok sosial. Menurut Parekh (2008: 28) pemahaman tentang identitas bisa diidentifikasi dalam beberapa dimensi yakni *pertama* adalah dimensi personal—yang merupakan identitas personal sebagai individu yang unik, memiliki tubuh berbeda, kesadaran dan subyektifitas.

*Kedua* adalah dimensi sosial—yang merupakan identitas sosial sebagai anggota dari kelompok tertentu yang terhubung dengan kelompok lain dalam relasi formal maupun informal. Kelompok masyarakat pada tahap ini masing-masing mendefinisikan dirinya dengan kelompok yang lain. *Ketiga* adalah dimensi kemanusiaan—mereka menganggap identitas sebagai anggota dari komunitas manusia secara keseluruhan, yang bisa membedakannya dengan makhluk lainnya di luar spesies manusia. Definisi ini mengandaikan identitas lebih luas, melampaui pembentukan identitas personal dan sosial.

Sementara Mark D, dkk (2008: 16) dalam *The Social Construction of Communities* menjelaskan bahwa identitas selalu beragam, tidak ada yang

memiliki satu identitas. Identitas dapat bersifat hibrid atau ganda, dan berbagai jenis identitas dapat berpotongan dan memotong satu sama lain, misalnya, jenis kelamin individu; keanggotaan orang itu dalam rumah tangga tertentu, masyarakat kedokteran, klan, atau komunitas; atau partisipasi mereka dalam sistem ideasional tertentu.

Elemen-elemen seperti ini membentuk identitas individu, dan elemen-elemen tertentu dapat ditekankan dalam konteks interaksi sosial yang berbeda. Dengan cara ini, selain menjadi hasil dari agensi seseorang, identitas seseorang dapat menjadi sumber daya (bagian dari struktur seseorang) yang digunakan untuk mengejar dan mewujudkan tujuan lebih lanjut. Berikut pernyataannya.

*Identity is always multifaceted: no one has just one identity. Identities can be hybrid or multiple, and different types of identities can intersect and crosscut each other, for example, the gender of an individual; that person's membership in a particular household, medicine society, clan, or community; or their participation in a particular ideational system. Elements such as these compose the identity of an individual, and particular elements may be emphasized in different contexts of social interaction. In this way, in addition to being an outcome of one's agency, a person's identity can be a resource (part of one's structure) that is drawn upon to pursue and realize further goals. (Mark D, dkk 2008: 16).*

Identitas bersifat relasional; mereka dibangun dalam konteks sosial tertentu dan dalam kaitannya dengan orang lain. Identitas adalah keanggotaan yang memiliki kesamaan dan perbedaan, dan identitas tersebut mendefinisikan kita sebagai milik kelompok tertentu dan bukan milik orang lain. Selain itu, jenis kategorisasi sosial ini membutuhkan keterlibatan berulang dan aktif. Identitas seseorang, dan kelompok yang menjadi miliknya, tidak pernah diperbaiki tetapi, sebaliknya, terus dinegosiasikan. Berikut pandangan Mark D.

*Identities are relational; they are constructed in particular social contexts and in relation to others. Identities are memberships of similarity and difference, and they define us as belonging to certain groups and not to others. Moreover, this type of social categorization requires recurrent and active engagement. One's identity, and the groups one belongs to, is never fixed but, rather, is continually negotiated. (Mark D, dkk 2008: 16)*

Sementara itu, Fukuyama dalam bukunya yang terkenal, *Identity: The Demand For Dignity and The Politic Resentment* (2018:18) menjelaskan bahwa istilah identitas dan politik identitas adalah sumber yang cukup baru, yang pertama telah dipopulerkan oleh psikolog Erik Erikson selama tahun 1950-an, dan yang terakhir hanya terlihat dalam politik budaya tahun 1980-an dan 90-an.

Identitas memiliki banyak arti saat ini, dalam beberapa kasus hanya merujuk pada kategori sosial atau peran, dalam kasus lain untuk informasi dasar tentang diri sendiri (seperti dalam “identitas saya dicuri”). Identitas tumbuh, dari perbedaan antara diri batiniah sejati seseorang dan dunia luar dari aturan sosial dan norma-norma yang tidak cukup mengenali nilai diri atau martabat batin. Individu sepanjang sejarah manusia telah menemukan diri mereka berselisih dengan masyarakat mereka.

Tetapi hanya di zaman modern ini ada yang berpendapat bahwa diri batiniah yang otentik secara intrinsik berharga, dan masyarakat luar secara sistematis salah dan tidak adil dalam penilaiannya terhadap diri yang pertama. Bukan diri batiniah yang harus dibuat agar sesuai dengan aturan masyarakat, tetapi masyarakat itu sendiri yang perlu diubah. Berikut kutipan pandangan Fukuyama.

*The terms identity and identity politics are of fairly recent provenance, the former having been popularized by the psychologist Erik Erikson during the 1950s, and the latter coming into view only in the cultural politics of the 1980s and '90s. Identity has a wide number of meanings today, in some cases referring simply to social categories or roles, in others to basic information about oneself (as in “my identity was stolen”). Used in this fashion, identities have always existed. In this book, I will be using identity in a specific sense that helps us understand why it is so important to contemporary politics. Identity grows, in the first place, out of a distinction between one’s true inner self and an outer world of social rules and norms that does not adequately recognize that inner self’s worth or dignity. Individuals throughout human history have found themselves at odds with their societies. But only in modern times has the view taken hold that the authentic inner self is intrinsically valuable, and the outer society systematically wrong and unfair in its valuation of the former. It is not the inner self that has to be made to conform to society’s rules, but society itself that needs to change. (2018:18).*

Politik identitas dengan demikian mencakup sebagian besar perjuangan politik dunia kontemporer, dari revolusi demokratis hingga gerakan sosial baru, dari nasionalisme dan Islamisme hingga politik di kampus-kampus universitas Amerika kontemporer. Memang, filsuf Hegel berpendapat bahwa perjuangan untuk pengakuan adalah pendorong utama sejarah manusia, kekuatan yang merupakan kunci untuk memahami munculnya dunia modern.

Sementara itu menurut Heller (dalam Syafuan dkk 2019: 1) politik identitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Menurutnya, politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di pihak lain politik identitas juga memicu pola-pola intoleransi, kekerasan verbal fisik dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan. Syafuan dkk (2019: 1) juga menjelaskan bahwa politik identitas bisa diartikan sebagai strategi dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial seperti agama, suku, ras dan kelompok dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.

Secara historis, istilah politik identitas pertama kali dijelaskan oleh L.A Kauffman yang melacak asal muasal pada gerakan mahasiswa anti kekerasan yang dikenal dengan *the Student Nonviolent Coordinating Committee*, sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal tahun 1960-an. Di situ politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara (Maarif, 2010:4, Laode, 2018: 6). Di awal kemunculannya isu politik identitas ini digerakkan oleh kelompok yang tertindas yang melakukan perjuangan untuk penegakan keadilan dan kesetaraan.

Namun dalam konstelasi di Indonesia, politik identitas memiliki arti yang berbeda yakni berhubungan dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang berkorelasi dengan elite untuk mengartikulasikan kepentingannya masing-masing. Di sini memang ada perbedaan pandangan tentang politik identitas seperti di barat dan di Indonesia. Khusus untuk kajian ini, peneliti berupaya melakukan pelacakan terhadap munculnya wacana identitas *kebalian* dalam masyarakat Bali. Wacana ini muncul seiring dengan dinamika sosial kultural sebagai akibat dari modernitas dan berkembangnya industri turisme.

*Kebalian* sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan identitas masyarakat Bali yang memegang teguh karakter, etik, pandangan dunia, tradisi, adat dan budaya Bali. Jadi *kebalian* melingkupi keseluruhan penanda atau ciri identitas Bali. Ada beberapa ciri dari *kebalian* ini yakni mereka yang menjadi pendukung budaya Bali, atau mereka yang secara aktif

mengikuti dan terlibat dalam tradisi budaya Bali. Oleh karena budaya Bali dijiwai oleh agama Hindu, maka *kebalian* juga berhubungan dengan eksistensi agama Hindu Bali. Kehilangan *kebalian* berarti ketiadaan ciri-ciri yang melekat pada masyarakat Bali itu sendiri.

Picard (2020: 303) menjelaskan bahwa kesadaran orang Bali, atau bangsa Bali sebagai entitas tunggal muncul saat era kolonial ketika orang Bali mulai mengenyam pendidikan barat dan lahirnya intelektual Bali. Mereka mulai berbahasa Melayu dan menerbitkan publikasi-publikasi berkala berbahasa Melayu. Melalui publikasi inilah orang Bali pertama kali menampilkan diri mereka sebagai entitas tunggal yakni bangsa Bali. Orang Bali memahami identitas mereka dengan apa yang dinamakan *kebalian*. *Kebalian* ini didasarkan pada agama dan adat.

## II. METODE

Penelitian tentang diskursus identitas kebalian ini menggunakan metode penelitian campuran atau kombinasi (*mixed methodology*), khususnya antara penelitian lapangan (*field research*) dan *discourse analysis*. *Mixed method* menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti ini memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan penelitian lapangan, data wawancara, namun juga analisis wacana, khususnya yang berhubungan dengan wacana-wacana identitas kebalian. Hal ini didasari atas fakta bahwa politik identitas tidak hanya muncul dalam tataran wacana, namun juga praktik sosial. Analisis wacana dalam konteks ini dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu pernyataan.

## III. PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan pariwisata, modernisasi, dan globalisasi di era Orde Baru memberi dampak serius pada kehidupan masyarakat Bali. Telah terjadi transformasi bahkan distorsi disegala bidang dan lini kehidupan, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan maupun keagamaan. Calinescu (Haryono, 2005:32) menegaskan bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Dengan demikian, modernitas identik dengan perubahan kebudayaan dunia sedang berkembang

yang terkait dengan modernisasi. Oleh karena itu, modernisasi berarti berlangsungnya proyek mencapai kondisi modernitas yang digerakkan oleh semangat rasionalitas-instrumental. Dalam hal ini, modernisasi ditandai dengan pemutusan hubungan yang tegas dengan nilai-nilai tradisional, berkembangnya sistem ekonomi kapitalis progresif, rasionalisasi administratif, dan diferensiasi sosial-budaya.

Selain itu, Abraham (1991:206) menjelaskan bahwa modernisasi merupakan suatu proses komprehensif pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, dan ekspansi budaya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses peningkatan secara progresif tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk pada umumnya. Mobilisasi sosial didefinisikan sebagai proses keterlibatan yang lebih besar dalam kelompok-kelompok sekunder, pola-pola baru, sosialisme antisipatoris, dan pembentukan kelompok referensi baru yang terpisah dari yang tradisional. Selanjutnya, ekspansi budaya didefinisikan sebagai proses penyempitan bidang aksi yang bersifat preskriptif, perluasan rentangan alternatif, serta memulai pola sosialisasi dan tingkah laku baru.

Pembangunan pariwisata Bali tidak dipungkiri membawa serta ide-ide modernitas di dalamnya. Salah satunya adalah berkembangnya sistem ekonomi kapitalis progresif yang dikendalikan oleh segelintir konglomerat. Periode akhir 1980-an dan awal 1990-an menjadi titik balik dalam arah pembangunan di Bali. Pembangunan ekonomi daerah, yang sebelumnya didasarkan pada intensifikasi pertanian, pariwisata skala kecil, dan ekspor kerajinan tangan mengalami transformasi setelah tahun 1987, ketika deregulasi sistem perbankan memicu ledakan investasi besar-besaran di Bali. Angka resmi menunjukkan peningkatan sepuluh kali lipat dalam investasi asing dan domestik dalam proyek-proyek besar di Bali (Warren, 2002: 240). Proyek ini tentu saja berhubungan dengan industri pariwisata.

Picard (2020: 246) merinci berbagai permasalahan yang ditemui di tengah perkembangan pariwisata di era Orde Baru. Pertama, Bali semakin terbuka terhadap investasi besar-besaran, terutama para konglomerat Indonesia yang umumnya adalah kroni keluarga Soeharto. Pada tahun 1988, Gubernur Bali membuka lebar investasi non pribumi di Bali. Di wilayah Nusa Dua sebagian besar terdapat jaringan hotel internasional, seperti Hilton, Holyday Inn, dan sebagainya. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar personel mereka direkrut dari tenaga kerja Bali, namun posisi manajemen dan kepemimpinan cenderung diisi oleh orang Barat, Jawa, atau Cina. Ketika pada awal 1990-an, Presiden Suharto menyetujui deregulasi ekonomi lebih lanjut yang disarankan oleh lembaga donor internasional sebagai satu-satunya cara untuk menyeimbangkan biaya transaksi yang tinggi dari sistem ekonomi Indonesia, investor asing diberikan akses yang lebih besar ke pasar negara.

Pada saat yang sama, Suharto memasang skema lisensi yang memaksa setiap orang yang memiliki ide bisnis untuk mendapatkan lisensi sebagai prasyarat untuk mewujudkannya. Skema ini, seperti yang diketahui bersama, sangat menguntungkan para anggota keluarga dan kroni Suharto. Lebih jauh lagi, skema ini mempercepat pelepasan industri pariwisata Bali, karena semakin banyak investor asing yang bermitra dengan 'perusahaan keluarga' Suharto (Ramstedt, 2014: 325).

Banyak contoh dari hal tersebut, salah satunya adalah Four Seasons Resort di Sayan dan Proyek Pecatu Indah Resort yang difasilitasi oleh Tommy Suharto. Awalnya masyarakat Bali mengharapkan kesempatan kerja baru untuk mereka, namun sebaliknya, sejumlah buruh migran murah rupanya didatangkan dari Jawa. Kasus Proyek Pecatu Indah Resort juga menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada keberadaan nelayan setempat yang tanahnya diklaim. Kasus ini ramai menjadi perbincangan publik, terlebih ada upaya memasukkan salah satu pura (Pura Lalang Bene) ke dalam teritorial Pecatu Indah Resort. Namun akibat krisis Asia tahun 1997/1998 yang segera melumpuhkan perekonomian Indonesia, rencana pembangunan tidak pernah terlaksana (Ramstedt, 2014: 325).

Gelombang kapitalisme yang mengeksploitasi sumber daya alam dan budaya Bali kembali muncul di wilayah Tabanan, tepatnya di Tanah Lot yakni pembangunan Bali Nirwana Beach Resort. Proyek ini menyerap 120 hektare lahan padi di kawasan pertanian subur Tabanan, yang dikenal sebagai lumbung beras Bali. Proyek ini mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Bali. Demonstrasi-demonstrasi masyarakat, yang dipicu oleh pemberitaan di *Bali Post*, memaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengeluarkan *bhisama*<sup>1</sup> yang berhubungan dengan penjagaan kesakralan tempat suci umat

---

<sup>1</sup> Dalam kamus Jawa Kuna-Indonesia oleh Mardiwarsito, dikatakan bahwa *Bhisama* berasal dari kata *Bhisana* (Sansekerta) yang berarti: mengerikan, menakutkan, berbahaya, hebat (Mardiwarsito, 1981). Penggunaan kata ini misalnya dapat dilihat dalam kekawin Ramayana Sarga XX bait 23, disana disebutkan : “...*sabda nyatita bhisana kagiri-giri purakeng deg widesa*” artinya “ ...Sinarnya sangat menakutkan memenuhi segala penjuru”. P.J. Zoetmulder dalam kamus Jawa Kuna – Indonesia menyebutkan bahwa *Bhisama* berasal dari kata *Wisana* (Sansekerta) yang berarti : tak sama, berbeda, ganjil, tak dapat disamai, sulit, sukar, tak menyenangkan hati, berbahaya, mengerikan, hebat, tak dapat disetujui, tak jujur, curang, tak adil (Zoetmulder, 1995).



Hindu. Ditentukan bahwa radius kesakralan di sekitar enam candi utama pulau ini (*sad kahyangan*) harus berukuran lima kilometer, di mana kesakralan candi-candi lokal (seperti candi-candi desa atau *kahyangan tiga*, candi-candi irigasi atau *pura subak*, dsb.) harus berukuran dua kilometer. Kedua ukuran ini secara kebetulan dilanggar oleh proyek BNR.

Guna menenangkan kemarahan publik yang didorong oleh proyek BNR itu, Presiden Suharto memberlakukan deklarasi tahun 1994 yang dikeluarkan oleh PHDI. DPRD Bali dengan demikian menghentikan proyek ini hingga Komisi Pengukuran Pengaruh Lingkungan mengeluarkan laporannya tentang kasus BNR ini. Sementara itu, agen-agen pemerintah pusat ikut campur di dalam melanggar deklarasi PHDI itu berdasarkan pada penafsiran yang salah tentang prinsip "*desa, kala, patra*" di seluruh Bali. Prinsip ini menunjukkan bahwa segala sesuatu harus diputuskan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan khusus tempat dan waktu tertentu dan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman khusus dan cara-cara masyarakat yang terlibat (Surpha 2006: 8, 32).

Munculnya sentimen masyarakat Bali mencapai titik kritis ketika mengetahui bahwa proyek Bali Nirwana Beach Resort dikelola oleh Grup Bakrie, sebuah perusahaan keluarga Muslim. Fakta bahwa Bakrie bersaudara, dan terutama Aburizal, berada di garis depan gerakan menuju penegasan diri di pihak Muslim Indonesia modernis, menambah ketakutan orang Hindu-Bali bahwa pulau mereka akan diambil alih oleh Islam (Ramstedt, 2014: 326). Terlepas dari gelombang demonstrasi massa di seluruh Bali, rencana direalisasikan dengan sedikit modifikasi, dan Bali Nirwana Beach Resort dibuka pada tahun 1997 sebagai waralaba dari rantai Le Meridien.

Gelombang protes dan penolakan juga ditujukan kepada proyek-proyek besar lain seperti *Bali Turtle Island Development* di Serangan, Garuda Wisnu Kencana dan proyek pengoperasian Pantai Padanggalak. Masyarakat Bali menganggap pembangunan proyek-proyek besar ini sebagai bentuk penjarahan sumber daya alam dan budaya mereka. Sebagaimana diketahui, alam dan budaya bagi masyarakat Bali memiliki hubungan yang sangat erat. Maka dari itu, perusakan alam Bali sama artinya dengan perusakan ruang-ruang budaya mereka.

Persoalan kedua yakni berbagai proyek pengembangan pariwisata telah meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja murah dan menyebabkan masuknya pendatang dari pulau tetangga seperti Jawa, Madura, dan Lombok. Para pekerja ini menerima upah lebih murah daripada tenaga kerja lokal. Di samping itu, stigma bahwa tenaga kerja Bali terikat pada sistem adat dan ritual sehingga mengharuskannya mengambil cuti atau libur lebih sering daripada tenaga kerja luar menyebabkan tenaga kerja Bali semakin kalah bersaing. Isu-

isu ini menjadi perhatian serius sejumlah tokoh Bali yang disuarakan melalui harian-harian lokal. Kebutuhan akan tenaga kerja ini juga menyebabkan ledakan penduduk pendatang di beberapa daerah di Bali seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar. Ledakan penduduk pendatang ini memiliki efek domino seperti kesemrautan tata ruang dengan semakin banyak lingkungan kumuh, tingginya tingkat kejahatan, kemacetan, dan kerawanan konflik sosial horizontal. Berlandaskan berbagai problem inilah muncul kekhawatiran bahwa masyarakat Bali akan semakin terdesak dan terpinggirkan di tanahnya sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, dapat ditegaskan kembali bahwa akumulasi dampak perkembangan pariwisata Bali menyebabkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan produktif untuk keperluan pembangunan akomodasi wisata, ledakan gelombang migrasi penduduk luar Bali yang mencari nafkah di Bali, persaingan ekonomi yang ketat antara penduduk lokal dan pendatang, sekularisasi kehidupan sehari-hari sebagai konsekuensi kehidupan modern, lemahnya otoritas lembaga-lembaga adat dan agama, semakin terpinggirkannya orang lokal di tengah desakan kapitalisme pariwisata, dan sempitnya ruang-ruang ekspresi budaya dan keagamaan.

Selain itu, menurut Wardana (2019: 4-5) dampak perkembangan industri pariwisata di Bali ini telah mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan Bali kontemporer. Banyak sarjana mengamati Bali mencapai titik kritisnya yang mengarah pada krisis sosio-ekologis. Berbagai persoalan inilah menimbulkan sebuah kecemasan di kalangan masyarakat Bali sehingga melahirkan diskursus yang bernada politik identitas yakni *kebalian*. Berikut kutipan wawancara dengan antropolog I Ngurah Suryawan.

“*Kebalian* sebagai wacana identitas muncul seiring dengan massifnya pembangunan pariwisata sejak pemerintah orde baru. Orang Bali semakin terpinggirkan bahkan tersingkir oleh proyek-proyek besar tersebut. Selain itu, ledakan penduduk pendatang cukup mengkhawatirkan, karena menyerobot ruang ekonomi orang Bali. Berbagai persoalan ini menyebabkan munculnya kekhawatiran dan melahirkan wacana *kebalian* yang tujuannya membangun kesadaran orang Bali akan situasi alam dan posisinya di dalam investasi tersebut. Pada periode Orba inilah arus investasi mengubah lanskap geografis (baca: hilangnya tanah Bali) dan pola pikir manusia Bali” (Wawancara 10 April 2022).

Senada dengan I Ngurah Suryawan, seorang intelektual lokal IDG Windu Sancaya juga menyampaikan sebagai berikut:

“Istilah *kebalian* sebenarnya muncul untuk merespon kondisi Bali di tengah gelombang pembangunan pariwisata. Banyak proyek besar yang dibangun di era orde baru, seperti misalnya Bali Nirwana Resort. Proyek ini sangat berdekatan dengan pura Tanah Lot yang disucikan. Selain itu, kondisi masyarakat Bali yang kian terpinggirkan di tengah pembangunan pariwisata dan masuknya budaya modern juga menjadi perhatian waktu itu sehingga munculnya pemikiran perihal *kebalian* orang Bali. Wacana *kebalian* ini sebenarnya lebih pada wacana intelektual, karena yang mengeluarkan juga adalah intelektual yang biasa menulis di Bali Post. Maksudnya adalah untuk menyadarkan orang Bali bahwa posisi mereka sebagai orang Bali sedang terancam di tengah riuh pembangunan pariwisata. *Kebalian* adalah penanda identitas sebagai orang Bali, yang punya beban moral untuk menjaga Bali. *Kebalian* melampaui identitas kasta, wangsa, banjar, desa dan sebagainya. Melalui wacana *kebalian* orang Bali diajak bersatu menjaga dan memikirkan Bali”. (Wawancara 5 Juni tahun 2022).

Berangkat dari kutipan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perubahan lanskap geografis Bali akibat pembangunan pariwisata era orde Baru membangun kesadaran orang Bali, khususnya kelas menengah terdidik, untuk mempertanyakan kembali posisinya sebagai orang Bali di tengah gegap gempita investasi pariwisata. Pada kenyataannya, orang Bali tidak sepenuhnya berperan sebagai subyek dari pembangunan tersebut, malah sebaliknya investasi besar di Bali dimiliki dan dikendalikan oleh para elite Jakarta. Kondisi ini melahirkan kecemasan bahwa orang Bali tidak bisa menjadi tuan dirumahnya sendiri, karena ruang-ruang ekonominya dikuasai oleh investor luar. Selain itu, pengaruh budaya modern melalui pariwisata juga dikhawatirkan akan menghancurkan identitas kebudayaan Bali dan membuat orang Bali tercerabut dari akar-akar kultural Balinya. Pariwisata budaya yang telah dirancang sebelumnya sebagai strategi jitu dalam merespon dampak buruk perkembangan pariwisata, ternyata dalam praktiknya berubah menjadi budaya pariwisata. Budaya Bali tidak lebih dari sekadar komoditas untuk melayani kepentingan pariwisata.

Pandangan berbeda disampaikan oleh seorang pemerhati Bali asal Prancis bernama Jean Couteau<sup>2</sup>. Ia mengemukakan bahwa munculnya *kebalian* sebagai wacana identitas tidak hanya merupakan respon terhadap industri turisme yang berkembang pesat di Bali, melainkan sebagai konsekuensi sosiologis dari semakin banyaknya orang Bali mengenyam pendidikan sehingga melahirkan yang namanya kelas terdidik baru. Mereka yang mengenyam pendidikan tinggi baik di Bali maupun luar Bali memiliki kecemasan terhadap perubahan sosial kultural yang terjadi di Bali. Kecemasan ini dieskpresikan secara produktif melalui wacana intelektual. Kecemasan ini melahirkan pemikiran perihal *kebalian* yang berupaya menyadarkan orang Bali akan kondisi makro dan mikro yang sedang terjadi di Bali. Bisa dikatakan, wacana *kebalian* adalah produksi kelas menengah terdidik Bali dalam upaya merespon kondisi obyektif yang terjadi di Bali. Berikut kutipan wawancaranya.

“Menurut pengamatan saya, *kebalian* sebagai wacana identitas muncul beriringan dengan semakin banyaknya orang Bali yang mengenyam pendidikan. Di tahun 1920-an pendidikan yang dibuka oleh pemerintah kolonial melahirkan kelas terdidik Bali yang berupaya mempertanyakan kembali kelangsungan tradisi, adat dan agama mereka. Sementara di tahun 1980-an, orang Bali yang sudah berpendidikan tinggi mulai aktif merespon berbagai persoalan sosial dan budaya yang terjadi di Bali. Mereka mempertanyakan nasib dan masa depan dari tradisi mereka di tengah pesatnya perkembangan turisme dan modernitas. Sebagai seorang terpelajar, mereka sudah punya kesadaran itu sehingga melahirkan wacana-wacana *kebalian*. Saat itu mereka menggunakan sarana-sarana produk modernitas seperti misalnya media massa untuk menyampaikan pandangan. Bisa jadi wacana ini melahirkan kesan pesimistik terhadap keutuhan budaya Bali, atau sebaliknya mengajak orang Bali untuk mempertahankan *kebalian* mereka” (Wawancara, 23 Juni tahun 2022).

Berangkat dari kutipan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa wacana *kebalian* adalah produksi ideasional dari kelas terdidik Bali. Faktor

---

<sup>2</sup> Jean Couteau adalah bule Prancis yang lama tinggal di Bali. Ia aktif sebagai pengamat sosial dan budaya Bali. Pernah menjadi salah satu penulis dan editor buku berjudul “Bali di Persimpangan Jalan” Jilid I dan II bersama Usadi Wiryatnaya. Banyak lagi buku tentang Bali yang pernah ditulis. Ia juga masih aktif menulis di kolom Udar Rasa Kompas.

pendidikan, media massa, dan terbangunnya kesadaran kritis sangat berdampak pada cara mereka merespon berbagai persoalan sosial kultural yang terjadi di Bali. Munculnya kesadaran kritis ini tidak bisa dilepaskan dari kontak orang Bali terhadap dunia pendidikan. Freire (dalam Widja, 2009: 72) mengemukakan ada tiga tipe kesadaran yang terkait dengan upaya membebaskan diri dari ketidakberdayaan. Tiga tipe kesadaran ini terdiri dari kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran magis menampilkan sosok jiwa yang tidak mampu melihat kaitan *variable* dalam suatu fenomena. Kesadaran tipe ini cenderung bersifat fatalistik. Mereka akan mencari penyebab penderitaan pada sesuatu di luar dirinya seperti hukuman dan kekuatan gaib. Sementara kesadaran naif menampilkan sosok jiwa yang berupaya memahami ketidakberdayaan dirinya berasal dari dalam diri sendiri atau melalui kekurangan diri sendiri. Tipe kesadaran ini biasanya memunculkan yang namanya rasa rendah diri. Berbeda dengan dua tipe kesadaran tersebut, tipe kesadaran kritis akan berupaya mencari tahu situasi dan kondisi yang dihadapi kelas bawah pada struktur sosial atau secara lebih luasnya sistem sosial, politik, ekonomi, serta budaya yang melatari mereka.

Jika dikorelasikan dengan tiga tipe kesadaran tersebut, bisa dikatakan bahwa wacana *kebalian* sebagai wujud ekspresi dari kesadaran kritis kelas terdidik Bali ketika melihat kondisi obyektif Bali dalam dinamika pembangunan pariwisata. Melalui kesadaran kritis, mereka berupaya mempertanyakan posisi orang Bali di tengah gebyar investasi pariwisata. Mereka—kaum terdidik Bali—juga mengkhawatirkan bahwa berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi di Bali akan berdampak pada krisis identitas dan penghancuran budaya Bali sehingga memunculkan wacana orang Bali semakin kehilangan kebalianya. Wacana identitas yang berhubungan dengan kesadaran kritis orang Bali perihal identitas bisa disimak dari artikel seorang intelektual Bali yang tinggal di luar Bali yakni Nyoman Naya Sujana pada koran Bali Post tahun 1988 yang berjudul “Orang Bali Semakin Kehilangan Kebaliannya”.

Pada artikelnya, Naya Sujana berupaya menganalisis perubahan besar dalam kebalian orang Bali sebagai akibat perubahan masyarakat dan kebudayaan. Ada berbagai faktor penyebab perubahan itu terjadi, namun salah satu yang menjadi sorotan adalah faktor industri pariwisata. Selain industri pariwisata, ada faktor lain seperti misalnya munculnya teknologi baru, sistem ekonomi baru, sistem pendidikan baru, pengaruh media massa, mobilitas

penduduk dan perubahan gaya hidup modern. Naya Sujana<sup>3</sup> berupaya membedakan situasi masyarakat dan kebudayaan Bali antara tahun 1950-an saat ia masih remaja dan situasi Bali saat ia menulis artikelnya tersebut. Berikut kutipannya.

“Kehidupan masyarakat Bali di Denpasar tahun 1950an masih dapat dikatakan sederhana, kehidupan adat dan agama Hindu sangat menonjol, kesenian sakral yang penuh dengan mitologis sangat luas, kehidupan sosial yang tertib dan aman sangat luas (relatif tidak ada pencuri karena masyarakat percaya betul hukuk karma), perilaku menyimpang dalam bidang seks seperti pelacuran hampir tidak dijumpai, penggunaan bahasa Bali dalam masyarakat sangat intensif, pakaian adat yang dipakai penduduk dijumpai di mana-mana, serta peranan kaum brahmana sebagai kasta tertinggi sangat kuat. Namun kini telah terjadi perubahan-perubahan yang mendorong orang Bali semakin menuju perubahan perilaku yang tidak terkontrol. Kini semakin sedikit orang Bali yang mampu membaca dan menulis dengan huruf Bali, kehidupan sosial semakin diwarnai dengan paham materialisme di mana kedudukan uang semakin penting, kehidupan masyarakat semakin kompleks di mana kini telah dijumpai panti-panti pijat, semakin meningkat peristiwa kriminalitas hingga terjadi perampokan bersenjata api, semakin banyak generasi baru tidak mematuhi hukum adat di banjar, semakin banyak orang Bali yang menikah exogami termasuk dengan kaum wisatawan asing, semakin banyak bahasa Bali dalam berkomunikasi diwarnai dengan bahasa Inggris, semakin banyak orang Bali mengadopsi nama-nama barat seperti Robert, Rudolph, Tommy, Dicky dan sebagainya” (1989).

Analisa Naya Sujana ini berujung pada kesimpulan bahwa orang Bali akan semakin kehilangan kebalikannya akibat perubahan-perubahan yang bisa diamatinya secara empiris seperti misalnya lemahnya wibawa lembaga tradisional dalam mengatur generasi baru, hilangnya kebanggaan generasi muda terhadap identitas daerah seperti salah satunya adalah bahasa dan

---

<sup>3</sup> Ada dua artikel dari Naya Sujana, pertama adalah artikel sebagai bahan diskusi antar dosen program studi Antropologi FISIP Unair tanggal 16 Januari 1989. Kedua, artikel yang diterbitkan di Bali Post tanggal 3 Desember 1988 dan tanggal 3 Januari 1989. Tulisan Naya Sujana mendapatkan reaksi keras dari pembaca karena dianggap menyinggung perasaan orang Bali.

busana daerah, selain itu perkawinan exogami juga menyebabkan terjadinya perkawinan campur, dan perubahan mentalitas orang Bali akibat pengaruh paham materialisme. Kian banyak orang Bali yang melakukan tindak kejahatan dan tidak meyakini hukum *karma*. Perubahan ini dalam pandangan Sujana semakin berlangsung cepat di tahun 1984an ketika industri turisme semakin di intensifkan dan wisatawan mulai banyak berdatangan ke Bali.

Selain itu, kebijakan pembangunan pariwisata besar-besaran di wilayah Bali selatan dan kebijakan bebas visa membuat Bali semakin disesaki oleh wisatawan. Kontak dengan budaya luar melalui industri pariwisata ini, dalam pandangan Sujana, menimbulkan *cultural discovery* di kalangan masyarakat Bali dan *cultural adaptation* secara relatif cepat, sehingga gejala ini menimbulkan semakin banyak masyarakat Bali yang meninggalkan adat dan kebudayaan yang dianggap tidak relevan dengan pergaulan internasional. Hal ini ditenggarai akan memunculkan yang namanya *cultural deprivation* dalam artian semakin banyak orang Bali meninggalkan unsur-unsur budaya tradisional dan kemudian mengadopsi budaya baru yang dianggap lebih sesuai perkembangan zaman.

Wacana ini memantik respon yang serius di kalangan intelektual Bali dan menghasilkan dinamika wacana identitas yang cukup kuat. Setelah munculnya wacana kebalian orang Bali, dilanjutkan dengan diadakan diskusi dengan tema “Kebalian Masyarakat Bali” pada tahun 1989. Diskusi yang diinisiasi oleh media Bali Post ini menghasilkan kontestasi wacana yang pada intinya berupaya merumuskan kembali *kebalian* orang Bali dan strategi yang dilakukan dalam rangka menjaga kebalian sebagai identitas orang Bali. Jika melihat konstelasi ini bisa ditegaskan bahwa *kebalian* yang muncul di tahun 1980-an merupakan wacana “politik identitas” kelas terdidik sebagai bentuk respon terhadap modernitas dan pembangunan pariwisata yang berdampak pada perubahan kehidupan sosial, budaya dan agama. Media massa cetak memiliki pengaruh yang besar memberi ruang diskursus perihal *kebalian*. Sebagaimana disampaikan Warren, (2002: 240-241) bahwa surat kabar daerah tidak hanya memainkan peran kunci dalam membawa proyek-proyek pariwisata ini di bawah pengawasan publik, tetapi juga secara sadar menetapkan ketentuan-ketentuan wacana.

Pandangan ini diperkuat oleh analisa Dwipayana (2005: 6) yang menjelaskan kuatnya identitas kebalian muncul melalui tiga sebab. Pertama muncul sebagai instrumen dari aktor-aktor lokal terhadap berbagai proses sosial-ekonomi-politik yang terjadi di Bali, atau sebaliknya bisa dibaca sebagai invensi dari modernitas dan negara. Sebagai sebuah invensi modernitas, maka *kebalian* muncul sebagai kreativitas dari aktor modern (peneliti menggunakan istilah kelas terdidik) untuk menggunakan tradisi

dalam kerangka kepentingan akumulasi kapital. Hal yang sama juga dilakukan oleh negara yang kemudian lebih memanfaatkan tradisi untuk kepentingannya sendiri, seperti pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan sebagainya.

Sebagai resistensi, fenomena menguatnya *kebalian* merupakan reaksi terhadap kehadiran dua kekuatan besar yang bisa saja dibedakan tetapi kehadirannya sering simultan yakni rezim modernitas dan proses negaraisasi. Rezim modernitas ternyata mempunyai kekuatan mengontrol individu dalam komunitas untuk memenuhi standar-standar kehidupan modern melalui berbagai macam proyek pendisiplinan. Sehingga modernitas kemudian membawa apa yang disebut sebagai homogenisasi yang meniadakan keunikan dan keberbedaan, sehingga identitas kemudian digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penolakan terhadap penyeragaman oleh modernitas.

Selain itu, lanjut Dwipayana (2005: 7) identitas *kebalian* juga merupakan reaksi terhadap perubahan konfigurasi ekonomi politik yang diakibatkan oleh kapitalisme pariwisata. Semakin intensifnya perkembangan industri turisme di Bali sejalan dengan menurunnya kapasitas negara sebagai penggerak ekonomi pasca *oil boom*, menimbulkan semakin besarnya gelombang migrasi dari daerah luar Bali ke Bali. Kehadiran migran dalam konteks pasca kolonial atau Orde Baru lebih didorong oleh rasionalitas ekonomi yang bertemu dengan logika kapitalisme pasar. Tidak berbeda dengan Dwipayana, Syafuan Rozi (2019: 181) menyampaikan bahwa identitas *kebalian* muncul sebagai kekhawatiran bahwa keunikan Bali dalam konteks agama dan budaya Hindu dapat tergerus oleh keserakahan kapitalisme dan semangat komersialisasi global. Ruh budaya Bali yang hebat itu terasa menua, melemah dan memudar, sehingga muncul ungkapan protes para cendekiawan Bali yang berbunyi “Kembalikan Baliku Padaku”.

#### IV. PENUTUP

Diskursus identitas *kebalian* muncul di kalangan kelas menengah terdidik Bali sebagai bentuk kegelisahan terhadap perubahan sosial-kultural dan ekologis yang terjadi sejak Orde Baru akibat perkembangan industri turisme. Akumulasi dampak perkembangan pariwisata Bali menyebabkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan produktif, ledakan gelombang migrasi penduduk luar Bali, persaingan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang, sekularisasi kehidupan sehari-hari sebagai konsekuensi kehidupan modern, perubahan budaya di kalangan generasi muda, lemahnya otoritas lembaga-lembaga adat dan agama, semakin terpinggirkannya orang lokal di



tengah desakan kapitalisme pariwisata, dan sempitnya ruang-ruang ekspresi budaya dan keagamaan. Dampak perkembangan industri pariwisata di Bali ini telah mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan Bali kontemporer. Berbagai persoalan inilah menimbulkan sebuah kecemasan sehingga melahirkan diskursus yang bernada politik identitas yakni *kebalian*. Selain itu, munculnya diskursus *kebalian* juga merupakan sebagai konsekuensi sosiologis dari semakin banyaknya orang Bali mengenyam pendidikan sehingga melahirkan yang namanya kelas terdidik baru. Mereka yang mengenyam pendidikan tinggi baik di Bali maupun luar Bali memiliki kecemasan terhadap perubahan sosial kultural yang terjadi di Bali. Kecemasan ini dieskpresikan secara produktif melalui wacana intelektual. Kecemasan ini melahirkan pemikiran perihal *kebalian* yang berupaya menyadarkan orang Bali akan kondisi makro dan mikro yang sedang terjadi di Bali. Bisa dikatakan, wacana *kebalian* adalah produksi kelas menengah terdidik Bali dalam upaya merespon kondisi obyektif yang terjadi di Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardhana dkk, I Ketut. 2011. *Masyarakat Multikultural Bali. Tinjauan Sejarah, Migrasi dan Integrasi*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Atmaja, Nengah Bawa. 2010. *Ajeg Bali: Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- . 1984. *Pemimpin, Pengikut dan Perlawanan Terhadap Belanda di Bali Pada Abad ke-19*. Program Studi Sejarah/Sntropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana Singaraja.
- Astra, Semadi I Gde. 1997. *Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII*. Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bakker. F. 1997. *Balinese Hinduisme and the Indonesian State: Recent Development*. Bijdragen tot de Tall, Land-en Volkenkunde 153, no 1 Leiden 15-41.
- Dharma Putra, I Nyoman & Pitana, I Gde (ed). 2011. *Bali dalam Proses Pembentukan Karakter Bangsa*. Denpasar: Pustaka Larasan.

- Dharma Putra & Ardika, I Wayan. 2004. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Balimangsi Press.
- Dwipayana, AA GN Ari. *Melewati Benteng Ajeg Bali*. Pengantar untuk Buku Henk Schulte Nordholt, Bali: Benteng Terbuka 1955-2005, 2010.
- 2005. *Globalism. Pergulatan politik Representasi atas Bali*. Uluangkep.
- 2001. *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Fukuyama, Francis. 2018. *Identity. The Demand for Dignity and The Politic of Resentment*. New York.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Geriya, I Wayan. 2008. *Tranformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Surabaya: Paramita.
- Gde Agung, Ide Anak Agung. 1993. *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gitananda, Sindhu (ed). 2018. *Bali dalam Narasi*. Denpasar: Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.
- Grillo, R.D. 2003. *Cultural Essentialism and Cultural Anxiety*. Anthropological Theory Vol 3(2): 157–173. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi.
- Guermonprez, Jean Francois. 2012. *Soroh Pande di Bali: Pembentukan Kasta dan Nilai Gelar*. Denpasar: Udayana University Press.
- Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. 2019. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hadiwijono. 2010. *Agama Hindu dan Budha*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Hauser-Schaublin, Brigitta. 2011. *Spiritualized Politic and The Trademark of Culture: Political actors and their use of Adat and Agama in Post-Suharto Bali*. Routledge.
- Howe, Leo. 2005. *The Canging World of Bali: Religion, Society dan Tourism*. Published by Routledge.
- Hooykaas. C. 1963. *Books made in Bali*. In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 119 (1963), no: 4, Leiden, 371-386.
- Kumbara, A.A Ngurah Anom. 2011. *Pergulatan Elite Lokal: Representasi Relasi Kuasa dan Identitas*. Yogyakarta: Impulse.
- Korn. V.E. 2017. *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali) Jilid II*. Denpasar: Udayana University Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2010. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: PUSAD.
- Mantra, I.B., 1996. *Landasan Budaya Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Nordholt, Henk Schulte. 2010. *Bali Benteng Terbuka*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- 2002. *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 1986. *Bali: Colonial Conceptions and Political Change 1700-1940*. Faculty of Social Sciences Erasmus University Rotterdam.
- Parekh, Bhiku. 2008. *Rethinking Multiculturalism. Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Paramita, I Gusti Agung. 2015. *Wacana Kebudayaan dalam Dinamika Pers di Arena Politik Lokal*. Tesis di Program Studi Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.
- 2020. *Wajah Tuhan dan Sifat Pemuja: Kumpulan Esai Agama dan Kebudayaan*. Badung: Sarwa Tattwa Pustaka.

Picard dan Madinier, 2011. *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali*. Routledge Contemporary Southeast

Asia Series.

————— 2020. *Kebalian. Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

————— 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Rozi, dkk, Syafuan. 2019. *Politik Identitas. Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sujana, Nyoman Jaya. 1989. *Perubahan Kebudajaan dan Semakin Memudarnya Kebalian Orang Bali Dewasa Ini*. Makalah tidak diterbitkan.

Suyono, Seno Joko. 2002. *Tubuh yang Rasis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitataif*. Bandung: Alfabeta.

————— 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Suryawan, I Ngurah. 2010. *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern*. Jakarta: Predana.

————— 2012. *Sisi di Balik Bali: Politik Identitas, Kekerasan, dan Interkoneksi Global*. Denpasar: Udayana University Press.

————— 2005. *Bali: Narasi dalam Kuasa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.